

**PENYALURAN DANA PENSIUN MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
PADA PT. TASPEN PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Pada Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:
DESY ANDRIYANI
NIM . 10625003853

PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM (S1)

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

2012

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **“PENYALURAN DANA PENSIUN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA PT. TASPEN PEKANBARU”**.

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penyaluran dana pensiun yang dilakukan oleh PT. Taspen Pekanbaru dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penyaluran dana pensiun tersebut

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di PT. Taspen Pekanbaru. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak PT. Taspen dan pensiunan yang menjadi peserta. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku- buku referensi yang penulis gunakan serta informasi- informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana pensiun pada PT. Taspen Pekanbaru, untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penyaluran dana pensiun. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan angket. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data secara kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan, Karyawan bagian penyaluran dan Pensiunan Tahun 2011 PT.TASPEN PEKANBARU yang berjumlah 97 orang.

Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa dapat diketahui bahwa penyaluran dana pensiun pada PT. Taspen Pekanbaru ternyata sesuai dengan tinjauan ekonomi islam hanya saja belum teroptimalkan secara terbuka dikarenakan berbagai ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari masalah-masalah kebijakan pemerintah yang terutama undang – undang yang mengatur dana pensiun yang sesuai syariah menyebabkan berbagai pihak terkait penyaluran dana pensiun belum secara lugas menjalankannya. Dalam perspektif ekonomi Islam bahwa dana pensiun berkaitan dengan hukum *ijarah* dimana PNS sebagai *ajir* sedangkan Pemerintah (PT. Taspen Pekanbaru) adalah majikan (*rabbul maal*)

sedangkan penyaluran dana pensiun pada PT. Taspen Pekanbaru menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dan perhitungan pembayaran dana para peserta pensiun sesuai dengan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kata Kunci : Penyaluran, dana, pensiun

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kelapangan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran agama Islam dan menyampaikannya kepada manusia, sehingga mereka terhindar dari jurang kehancuran dan membawanya menuju keridhaan Allah Swt, di dunia dan akhirat.

Berkat rahmat dan hidayah Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Prodi Ekonomi Islam (EI) Universitas Islam Negeri Suska dengan judul “ **PENYALURAN DANA Pensiun Menurut Perspektif Ekonomi Islam pada PT. TASPEN PEKANBARU**”. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan petunjuk, bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa buat Ayahnda (Alm. Anwar) dan Ibunda (Syamsinar) tercinta yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil mulai dari kecil sampai penulis berada di perkuliahan ini.

2. Untuk Abang – Abangku Jhon Hendri S.Pd, M.Si, Hendriyanto S. Kom dan Kakakku Linda Hartati yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Drs. Hajar M, MH selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta kontribusi pemikiran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak kepala Prodi Ekonomi Islam yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pimpinan perpustakaan beserta responden, baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan Program pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas pinjaman buku dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada sahabat – sahabatku Yeni, Memel, Cici dan Ade dan rekan - rekan seperjuangan Prodi Ekonomi Islam B angkatan 2006 yang telah memberikan dorongan dan motifasi selama penulis berada dibangku perkuliahan.
7. Serta semua pihak yang ikut serta secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca.

Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM PT. TASPEN PEKANBARU	
A. Sejarah Pendirian Kantor Cabang PT. Taspen Pekanbaru	14
B. Visi dan Misi PT. Taspen Pekanbaru	16
C. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen Pekanbaru	19
D. Wilayah Kerja.....	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Dana Pensiun.....	33
B. Jenis – jenis Kelembagaan Pensiun.....	34
C. Tujuan dan Manfaat Dana Pensiun.....	38
D. Program Dana Pensiun Syariah.....	42
E. Dana Pensiun Menurut Ekonomi Islam	48
BAB IV PENYALURAN DANA PENSIUN PADA PT. TASPEN PEKANBARU	
A. Mekanisme Penyaluran Dana di PT. Taspen Pekanbaru.....	52

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Penyaluran Dana Pensiun	
PT. Taspen Pekanbaru	61
C. Penyaluran Dana Pensiun Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Data Pensiun PT. Taspen Pekanbaru Tahun 2011	56
Tabel IV.2	Data pembayaran pensiun PT. Taspen Pekanbaru	57
Tabel IV.3	Pendistribusian pembayaran dana para peserta pensiun PT. Taspen	58
Tabel IV.4	Tabel Rumus Perhitungan Hak Peserta Pensiun	59
Tabel IV.5	Tanggapan responden tentang adanya program dana pensiun PT. Taspen Pekanbaru	64
Tabel IV.6	Tanggapan responden tentang waktu menjadi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	65
Tabel IV.7	Tanggapan responden tentang penyaluran dana pensiun pada PT. Taspen Pekanbaru	66
Tabel IV.8	Tanggapan responden tentang prosedur penyaluran dana pensiun pada PT. Taspen Pekanbaru	67
Tabel IV.9	Tanggapan responden tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta program pensiun PT. Taspen Pekanbaru	68
Tabel IV.10	Tanggapan responden tentang batasan usia lama menerima program dana pensiun pada PT. Taspen Pekanbaru.....	69
Tabel IV.11	Tanggapan responden tentang waktu pencairan dana pensiun oleh PT. Taspen Pekanbaru.....	70
Tabel IV.12	Tanggapan responden tentang penetapan waktu pengambilan dana pensiun yang dicairkan oleh PT. Taspen Pekanbaru.....	71
Tabel IV.13	Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan oleh PT. Taspen Pekanbaru	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, ini menyebabkan banyak berkembangnya aktivitas-aktivitas muamalah dalam rangka memenuhi kegiatan ekonomi secara syar'i. Kegiatan-kegiatan muamalah tersebut banyak dilakukan dengan terlibatnya pada lembaga-lembaga keuangan islam, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia khususnya berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya adalah dana pensiun syariah.

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi tersebut dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Dan dana pensiun syariah itu sendiri adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Penyaluran dana pensiun yang sesuai dengan ajaran islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.

Maka di sini dana pensiun memiliki peranan yang penting untuk kelanjutan hidup seseorang di masa-masa pensiunnya. Di pembahasan ini kami akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Dana Pensiun termasuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah

Sebagian orang pun mencari pekerjaan yang dapat memberikan tunjangan-tunjangan lain diluar penghasilan pokoknya perbulan. Pegawai Negeri Sipil atau yang lebih kita kenal dengan PNS adalah salah satu kelompok pekerja yang merupakan abdi negara yang menjadi tanggungan pemerintah dalam hal penggajian, tunjangan, dan juga dana pensiun. Maka dari itu tidak sedikit pula orang-orang yang berminat menjadi PNS. Selain itu para PNS pun tidak perlu khawatir dalam hal penggajian, karena mereka bukan digaji oleh perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja, melainkan gaji para PNS telah masuk dalam APBN setiap bulannya¹.

¹http://www.bapepam.go.id/dana_pensiun/regulasi_dp/regulasi_terkait_dp/PSAK%2018%20Akuntansi%20Dana%20Pensiun

Untuk mencapainya semua orang berusaha meningkatkan penghasilan yang mereka dapatkan selama bekerja. Tentunya setiap orang mengharapkan kesejahteraan pada masa tua atau pada masa tidak bekerja (pensiun). Sejak dahulu, bahkan hingga kini banyak orang yang ingin menjadi pegawai negeri karena mendambakan dana pensiun saat setelah tidak bekerja. Hal ini disebabkan karena setiap manusia ingin mendapatkan kehidupan yang terjamin sampai hari tua. Pemberian pensiun kepada pegawai bukan hanya memberikan kepastian penghasilan dimasa depan, akan tetapi ikut memberikan motivasi bagi pegawai untuk lebih giat bekerja. Pemberian dana pensiun bagi PNS pun tidak selalu lancar. Terkadang ada beberapa kendala dalam hal pembayarannya. Masalah-masalah yang ada dikarenakan pembayaran pensiun tidak hanya secara tunai, melainkan melalui cek pos, dan melalui rekening dari bank-bank yang telah bekerja sama dengan PT. TASPEN (PERSERO).

Dengan memberikan program jasa pensiun ini maka pegawai akan merasa aman, terutama mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sehingga pensiunan tersebut dapat hidup sejahtera di masa pensiun mereka, dan dapat menikmati masa tua dengan apa yang sudah mereka lakukan selama bekerja.

Dengan makin besarnya pertumbuhan dana pensiun di Indonesia, tenaga-tenaga profesional dalam mengelola dana tersebut perlu dikembangkan oleh lembaga-lembaga pensiun.

Ada beberapa istilah program pensiun yaitu:

1. Program pensiun yang dikelola oleh perusahaan/pemberi kerja yang diberikan dari cadangan perusahaan (*book reserved*) atau biaya perusahaan (*pay as you go*)
2. Program pensiun yang dikelola oleh yayasan dana pensiun yang telah memperoleh fasilitas perpajakan dari pemerintah
3. Program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pejabat negara yang dikelola oleh PT. TASPEN
4. Program pensiun Anggota TNI dan POLRI yang dikelola oleh PT. ASABRI ²

Pada hakikatnya, Penyaluran dana oleh dana pensiun merupakan tabungan masyarakat (dalam hal ini peserta dana pensiun) yang mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang untuk dinikmati hasilnya setelah menjadi peserta/anggota pensiun³. Tujuan dari dibentuknya program dana pensiun adalah menyisihkan sebagian dana selama masa produktif kerja, sehingga pada saat berhenti bekerja atau tidak bekerja dalam artian pensiun, dana tersebut dapat dike CC CCC

.....,LM, M MMbalikan sebagai dana investasi atau tabungan pensiun, ini dilihat dari Pekerja (guru). Sedangkan tujuan yang lebih mendasar tentang adanya dana pensiun ini antara Pemberi Kerja (dalam hal ini Pemerintah) adalah :

- a. Kewajiban moral, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada pegawai pada saat mencapai usia pensiun

² Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, (Jakarta:PT. Gaja Grafindo Persada) h. 34

³ *Ibid*

- b. Loyalitas, dengan diadakan program pensiun, pegawai diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi, serta lebih bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Adapun yang dimaksud dengan Pensiun disini adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan dimasa tidak bekerja.

Ada beberapa pengertian dana pensiun yaitu:

1. Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.⁴
2. Dana Pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan(pegawai) pada saat mereka mencapai masa pensiun, meninggal dunia dan cacat.⁵

Sehubungan dengan hal itu maka dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Perusahaan Perseroan atau secara singkat disebut PT TASPEN (Persero) didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15/1963 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Pemerintah No. 26/1981.

⁴ UU No. 11, Tahun 1992

⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007) h 1073

Pendirian PT TASPEN (Persero) bertujuan untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk 47 Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil. Sampai dengan akhir tahun 2005 PT TASPEN (Persero) telah melayani 3.879.842 peserta aktif dan 1.948.206 penerima pensiun.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta dan penerima pensiun, PT TASPEN (Persero) memiliki jaringan pelayanan yang cukup luas cakupannya sebagaimana tercermin dari gambaran berikut :

- a. 7 (Tujuh) kantor Cabang Utama dan 35 Kantor Cabang di seluruh Indonesia.
- b. Lebih dari 4000 titik pelayanan melalui kerjasama dengan bank dan kantor pos di seluruh Indonesia.
- c. Sosialisasi melalui dialog interaktif di radio baik RRI maupun Swasta di setiap Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT TASPEN (Persero) No.49/DIR/SK/87 Tanggal 8 Agustus 1987 dibentuklah Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) di wilayah Pulau Sumatera termasuk Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) Pekanbaru. Di samping itu PT TASPEN (Persero) Cabang Pekanbaru juga menyediakan lebih dari 121 titik pelayanan yang bekerja sama dengan Perbankan dan Kantor Pos di wilayah Propinsi Riau dan wilayah Propinsi Kepulauan Riau. Sampai dengan akhir Desember 2004 Kantor Cabang Pekanbaru melayani 77.701 Peserta Aktif dan 22.852 Penerima Pensiun ditambah dengan para keluarganya.

Dalam Penyaluran dana pensiun yang dimaksud disini adalah PT. TASPEN Pekanbaru.

Fungsi dan tugas badan Penyaluran dana pensiun:⁶

- a. Pengadministrasian program pensiun
- b. Memelihara semua catatan peserta pensiun
- c. Administrasi Keuangan

Oleh karena itu Penyaluran Dana yang baik dan benar, serta cara kerja yang profesional sangat membantu untuk proses Dana Pensiun yang sangat diharapkan, agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan, baik itu pihak Taspen selaku pengelola maupun pihak pensiunan selaku pihak pensiun.

Sehubungan dengan hal itu maka faktor penyaluran sangat penting dalam upaya untuk memberikan dana pensiun yang baik kepada para pensiunan atau PNS. Hal ini dapat terbantu dengan penyaluran dana pensiun yang baik dan benar serta penyalurannya kepada anggota pensiun oleh Taspen yaitu selaku pihak pengelola.

Dari beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dan kondisi riil yang ada, maka penulis sangat tertarik untuk membahas kajian ini dengan memberi judul penelitian ini sebagai berikut: “ **PENYALURAN DANA PENSIUN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA PT. TASPEN DI PEKANBARU.**”

⁶Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) h. 477

B. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi penelitian dengan memfokuskan terhadap Penyaluran Dana Pensiun bagi anggota pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2011.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat disusun rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran dana pensiun pada PT. TASPEN (Persero) di Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat penyaluran dana pensiun pada PT. TASPEN (Persero) di Pekanbaru
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang penyaluran dana pensiun di PT. TASPEN Pekanbaru.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui bagaimana penyaluran dana pensiun pada PT. TASPEN Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat penyaluran dana pensiun pada PT. TASPEN (Persero) Pekanbaru
 - c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam tentang penyaluran dana pensiun pada PT. TASPEN (Persero) Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kesempatan bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori atau konsep-konsep yang telah penulis dapatkan.
- b. Sebagai informasi yang berguna bagi pembaca hasil penelitian ini khususnya yang dianggap penting untuk peneliti selanjutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada PT. TASPEN Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian ini adalah Pimpinan, Karyawan bagian penyaluran dan Peserta pensiun pada PT. Taspen Pekanbaru tahun 2011.
- b. Objek Penelitian adalah penyaluran dana pensiun pada PT. Taspen.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, Penulis dapatkan dengan cara melakukan observasi, angket dan wawancara langsung dengan pihak TASPEN
- b. Data sekunder, penulis dapatkan dengan cara pengkajian buku-buku sumber dan literature yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan, 3 orang Karyawan bagian penyaluran dan peserta pensiun pada PT.TASPEN PEKANBARU tahun 2011 berjumlah 3092 orang.

Pengambilan minimum ukuran sampel dalam Umar⁷ dapat digunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel dalam penelitian ini sebesar 10% karena tingkat homogenitas sampel yang tinggi

Berdasarkan rumus diatas sampel berjumlah sebanyak 97 orang dengan sistem random sampling (acak) menurut Narbuko, Arikunto dan Umar.

Sampel ditentukan dengan metode *random sampling* yaitu suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, pemilihan dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

⁷ Husein Umar,., "*Metode Riset Bisnis*". (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2003), h. ,

5. Metode Pengumpulan data

- a. Observasi yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan pengamatan langsung di lokasi Taspen
- b. Angket yaitu penyuguhan beberapa angket yang bersifat beberapa pertanyaan kepada peserta program pensiun tentang penyaluran dana pensiun
- c. wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada karyawan PT. Taspen
- d. Studi Dokumentasi yaitu teknik Pengumpulan data dari buku-buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan objek yang diteliti secara menyeluruh dan membandingkan dengan teori yang ada dengan praktek yang sesungguhnya.

7. Teknik Penulisan

- a. Metode Deskriptif yaitu setelah semua data sudah sudah berhasil terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

- b. Metode Induktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah- kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi, jumlah bab yang digunakan adalah sebanyak lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT. TASPEN

Yang berisikan diuraikan mengenai gambaran umum tentang PT. Taspen Pekanbaru, yang berisikan sejarah berdirinya, visi dan misi PT. Taspen Pekanbaru, struktur organisasi dan uraian jabatan PT. Taspen Pekanbaru, wilayah kerja

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang pengertian dan dasar hukum dana pensiun, ketentuan pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun, jenis kelembagaan dana pensiun (DPLK), sistem pembayaran pensiun, keunggulan dan kelemahan dana pensiun, pandangan islam terhadap ekonomi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang menjelaskan tentang mekanisme penyaluran dana pensiun pada PT.TASPEN, Faktor-faktor pendorong dan penghambat penyaluran dana pensiun pada PT.TASPEN, penyaluran dana pensiun perspektif Ekonomi Islam,

BAB V : PENUTUP

Yang merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran yang merupakan rekomendasi penulisan dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. TASPEN PEKANBARU

A. Sejarah Pendirian Kantor Cabang PT. TASPEN PEKANBARU

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT TASPEN (Persero) No.49/DIR/SK/87 Tanggal 8 Agustus 1987 dibentuklah Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) di wilayah Pulau Sumatera termasuk Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) Pekanbaru.

Dengan adanya penugasan dari Pemerintah kepada PT. TASPEN (PERSERO) untuk menyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat di Wilayah Sumatera berdasarkan SK. Menteri Keuangan Nomor 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 dan penugasan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom berdasarkan SK. Mendagri No. 842.1-1402 tanggal 14 November 1987, maka dibukalah Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Pekanbaru tepatnya pada bulan Desember 1987 dengan menyewa sebuah Gedung berlantai dua terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim No. 47 Pekanbaru. Ketika itu KC Pekanbaru membawahi beberapa Kantor Unit Pelayanan antara lain Unit Taspen Dumai yang meliputi wilayah pembayaran Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, Unit Taspen Rengat meliputi wilayah pembayaran Kabupaten Indragiri hulu dan Indragiri Hilir,

Unit Taspen Tanjungpinang meliputi wilayah Kotip Tanjungpinang, Batam dan Kabupaten Kepulauan Riau.¹

Terhitung mulai bulan Januari 1988 secara resmi Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) Pekanbaru dioperasikan. Kewenangan saat itu hanya sebatas pada penerimaan dan penelitian permohonan Klim THT dan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Pensiun serta membayarkan pensiun bulanan.

Proses pencairan Klim dan SPP pensiun dan pencetakan dapem bulanan dilakukan oleh Kantor Cabang Utama Padang. Kondisi itu berjalan hingga bulan Maret 1988. Mulai 1 April 1988 Kantor Cabang Pekanbaru diberi wewenang untuk menerima, meneliti, menghitung dan membayar THT dan Pensiun serta mencetak Dapem untuk wilayah pembayaran Propinsi Riau. Penyelesaian SPP Prioritas diselesaikan dalam tempo 1 hari dan SPP non Prioritas diselesaikan dalam waktu 2 hari.

Kebijakan Direksi Taspen memberikan kewenangan kepada Kantor-kantor Cabang dibawah KCU Padang, yakni KC. Pekanbaru, Bukittinggi dan Jambi untuk memproses seluruh SPP dan Pencetakan Dapem di wilayah kerjanya masing-masing, sangat meringankan beban kerja KCU Padang.

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/DIR/SK/1989, terhitung mulai 1 April 1989 seluruh Kantor Unit

¹ Syamsuri (Pimpinan PT. Taspen Pekanbaru), *Wawancara*, Tgl 20 Februari 2012, PT. Taspen Pekanbaru

Taspen di Sumatera dihapus dan digabung ke Kantor Cabang, maka Kantor Unit Dumai, Rengat dan Tanjungpinang bergabung dengan KC.Pekanbaru.

Untuk menunjang keberhasilan usaha pelayanan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain adanya gedung kantor yang representatif seperti berdirinya gedung kantor PT Taspen (Persero) Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sudirman No.317, didirikan di atas tanah seluas 2.538 m² dengan luas bangunan 1.150 m². Gedung kantor ini, dibangun dua lantai dan dirancang sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai pusat kegiatan administrasi dan pelayanan. Penampilan yang kokoh dan berciri khas Daerah Riau sengaja dibentuk dengan bantuan kontraktor PT Mohairson dan konsultan PT Yodya Karya. Gedung Kantor PT TASPEN (Persero) Cabang Pekanbaru diresmikan pada tanggal 10 Februari 1994 oleh Gubernur Propinsi Riau Suropto didampingi Direktur Utama PT Taspen (Persero) Purwanto Abdulcadir saat itu dan hingga kini masih berdiri dengan megah.

B. Visi dan Misi TASPEN

1 Visi

Menjadi pengelola dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya.

2 Misi

Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan *stakeholder* lainnya secara profesional dan akuntabel, berlandaskan integritas dan etika yang tinggi.

PT. TASPEN (PERSERO) berusaha melaksanakan visi dan misi tersebut secara baik dan konsisten.

Selain itu PT. TASPEN (PERSERO) dalam hubungannya dengan para peserta dan *stakeholder*, memiliki pedoman atau acuan dalam bertindak melayani peserta. Adapun hal tersebut disebutkan dalam 5 nilai utama PT. TASPEN (PERSERO) yaitu:

- TUMBUH

1. Menumbuh kembangkan perusahaan sesuai dengan visi dan misi TASPEN.
2. Mengembangkan diri dan mampu mengikuti tuntutan perubahan yang menjadi baik karena tuntutan lingkungan internal dan eksternal.
3. Berpikir positif dan konstruktif serta bertindak produktif tanpa keinginan untuk berbuat yang kontra produktif.
4. Senantiasa meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada peserta.

- ETIKA

1. Menjunjung standar etika yang tinggi dalam berinteraksi antar sesama rekan kerja maupun dalam memberikan kepada peserta.
2. Ramah dan rendah hati.
3. Menjaga rahasia dan citra perusahaan.
4. Menghargai dan menghormati sesama rekan kerja maupun peserta.

- PROFESIONAL

1. Mengatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar.
2. Mengerjakan dan mengelola pekerjaannya serta melayani peserta TASPEN dengan tepat.
3. Menyelesaikan setiap masalah dengan memberikan solusi yang tepat berdasarkan kompetensinya.
4. Mampu melaksanakan komunikasi lisan maupun tertulis secara baik dan benar.

- AKUNTABILITAS

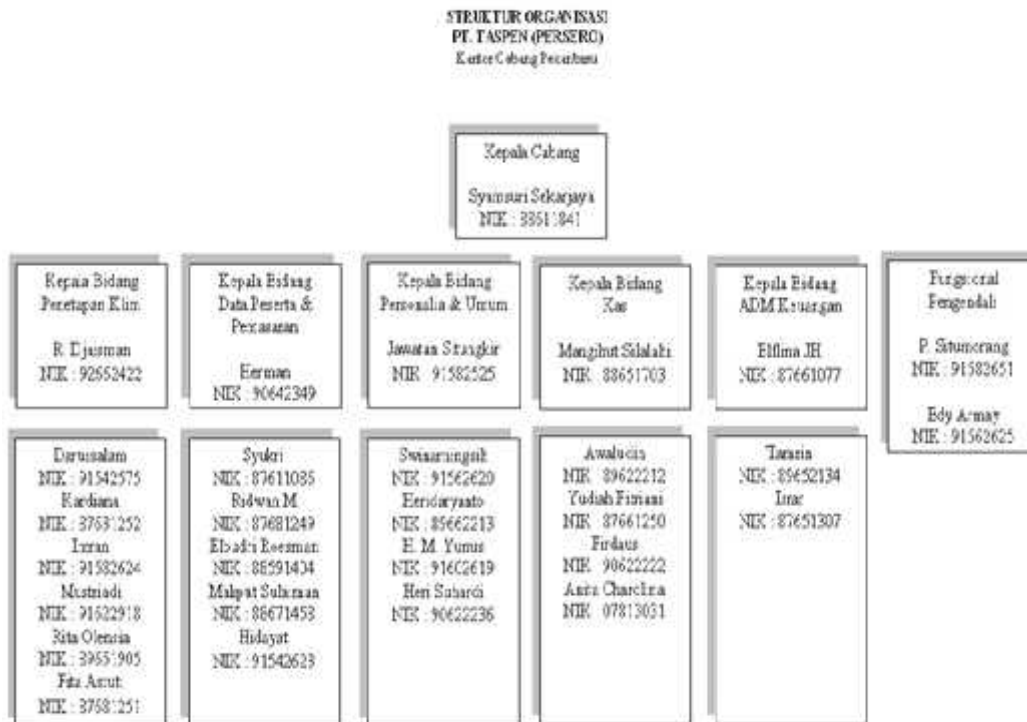
1. Setiap pekerjaan dapat ditelusuri prosesnya berdasarkan sistem dan prosedur kerja.
2. Dapat dipercaya.
3. Bertanggung jawab dan tidak melemparkan kesalahannya kepada orang lain.
4. Tuntas dalam melaksanakan semua pekerjaan dan tugasnya secara baik dan benar.

- INTEGRITAS

1. Jujur (tidak bohong).
2. Konsisten dengan apa yang diucapkan dan apa yang dijalankan.
3. Disiplin dan taat dengan semua ketentuan dan peraturan TASPEN.
4. Dedikasi kepada tugas dan kewajiban serta loyal kepada TASPEN sebagai perusahaan pengelola Dana Pensiun dan THT.

C. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. TASPEN PEKANBARU

Struktur Organisasi



Uraian Jabatan

Setiap perusahaan mengharapkan agar tujuannya tercapai dengan baik. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan perusahaan harus direncanakan dan dijalankan dengan baik. Hal itu akan terjadi jika manajemen di dalam perusahaan tersusun dengan rapi dan terdapat struktur organisasi².

Struktur organisasi mencerminkan garis wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing bagian dan hubungan bagian yang satu dengan yang lainnya, serta merupakan kerangka kerja operasional perusahaan yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan diawasi dalam mencapai keseluruhan tujuan

² Jawatan (Kabid Personalia dan Umum PT. Taspen Pekanbaru), Wawancara, Tgl 23 Februari 2012, PT. Taspen Pekanbaru

perusahaan. Struktur organisasi PT. TASPEN (PERSERO) KCU PEKANBARU dapat dilihat pada lampiran, adapun uraian tugas dari struktur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Cabang Utama

1. Pembinaan yang dapat mendukung mutu pelayanan demi kepuasan peserta dan karyawan Kantor Cabang Utama Pekanbaru dan Kantor Cabang di wilayahnya, yang meliputi:
 - a. Pengolahan sistem dan teknologi informasi.
 - b. Pelayanan keuangan.
 - c. Audit Mutu Internal.
 - d. Personalia dan Umum.
2. Pelaksanaan delegasi wewenang dari kantor pusat.

b. Wakil Kepala Kantor Cabang Utama

1. Perencanaan dan pengendalian kegiatan Kantor Cabang Utama.
2. Pengelolaan kegiatan operasional Kantor Cabang Utama.
3. Penyelenggaraan tugas yang dapat mendukung mutu pelayanan demi kepuasan peserta untuk Kantor Cabang Utama, meliputi: tinjauan manajemen, audit mutu internal, tindakan koreksi & pencegahan, kontrol dokumen dalam data, teknik statistic, dan pengendalian catatan mutu.
4. Pembinaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan unit kerjanya.

c. Kepala Bidang Pelayanan

1. Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pemasaran.
2. Pengelolaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Peserta Program TASPEN.
3. Persetujuan atas keabsahan dan pembayaran manfaat klim yang diajukan.
4. Penetapan besarnya premi peserta Program TASPEN.
5. Pengelolaan kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, verifikasi dan pelaporan kepada Manajemen kantor Cabang.
6. Tindak lanjut terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan.

d. Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran

1. Administrasi dan pemeliharaan data peserta Program TASPEN.
2. Penyajian data peserta Program Asuransi dan Program Pensiun di kantor cabang yang akurat.
3. Koordinasi pengiriman/ penerimaan data ke/dari Kantor Pusat dan Kantor Cabang dan/ atau instansi terkait.
4. Analisis dan pengendalian data peserta Program TASPEN penetapan besarnya tagihan premi peserta Program TASPEN.

5. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pemasaran atas produk Program TASPEN.
6. Penyelenggaraan kegiatan pertanggung jawaban dari calon peserta program TASPEN.

e. Kepala Seksi Penetapan Klim

1. Pengesahan kebenaran pengajuan klim manfaat Program TASPEN.
2. Penyelenggaraan perhitungan hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pelayanan pembayaran klim Pensiun dan Asuransi.
4. Penetapan besarnya klim manfaat Program TASPEN.

f. Kepala Bidang Personalia dan Umum

1. Pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pendistribusian ke unit- unit kerja di lingkungan Kantor Cabang sesuai kebutuhan unit kerja.
2. Koordinasi dan evaluasi pengelolaan fasilitas- fasilitas kerja di Kantor Cabang.
3. Pengelolaan kegiatan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Keamanan, Kearsipan, Pendidikan dan Latihan serta Non Kedinasan lainnya.
4. Penyelenggaraan administrasi daftar gaji dan kompensasi lainnya serta penyelesaian kewajiban pajak yang berlaku.
5. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan administrative PKBL di wilayahnya.

6. Penyelenggaraan Kualifikasi Rekanan terhadap rekanan baru dan entry database rekanan ke dalam daftar rekanan mampu.
7. Evaluasi Rekanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.
8. Dokumentasi terhadap seluruh kegiatan sistem mutu yang telah disepakati.

g. Kepala Seksi Personalia

1. Penyelenggaraan kegiatan administrasi personalia Kantor Cabang serta penetapan pemberian fasilitas bagi karyawan dan keluarganya.
2. Penyimpanan dan pemeliharaan keakuratan serta kerahasiaan data / dosir karyawan.
3. Koordinasi pembayaran hak- hak karywan di Kantor Cabang (gaji, tunjangan, penggantian biaya- biaya, dll).
4. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan, pembinaan mental karyawan, olahraga, dan kegiatan non kedinasan lainnya.
5. Penyusunan daftar gaji dan kompensasi lainnya serta pajak penghasilan.

h. Kepala Seksi Umum

1. Penyelenggaraan kegiatan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Kearsipan di Kantor Cabang.
2. Koordinasi pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan atas *assets* perusahaan di Kantor Cabang.
3. Pengendalian, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, distribusi peralatan kantor, dan computer di Kantor Cabang.

4. Pengelolaan kegiatan operasional dan administrasi PKBL.
5. Penyelenggaraan tertib administrasi aktiva.
6. Pelaksanaan kegiatan pengamanan karyawan dan *assets* perusahaan di Kantor Cabang.

i. Kepala Bidang Keuangan

1. Perencanaan dan pengendalian fungsi- fungsi keuangan di Kantor Cabang.
2. Perencanaan dan pengendalian anggaran di Kantor Cabang.
3. Penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan Kantor Cabang.
4. Penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kantor Cabang.

j. Kepala Seksi Kas

1. Perencanaan dan pengendalian penerimaan dan pengeluaran (*cash flow*) Kantor Cabang.
2. Penerimaan dan pembayaran atas perintah Kepala Bidang Keuangan.
3. Verifikasi sebagai langkah pre- audit transaksi keuangan di Kantor Cabang.
4. Penyimpanan uang dan surat- surat berharga.
5. Penagihan premi di Kantor Cabang.

k. Kepala Seksi Administrasi Keuangan

1. Penyusunan laporan keuangan dan laporan manajemen keuangan Kantor Cabang.
2. Penyelenggaraan administrasi aktiva tetap Kantor Cabang.

3. Rekonsiliasi bank dan pengecekan terhadap catatan pembukuan Program Taspen.
4. Kajian dan analisis laporan keuangan Kantor Cabang.

l. Kepala Bidang Sistem Informasi

1. Pengoperasian Sistem dan Teknologi Informasi yang telah dikembangkan oleh Kantor Pusat serta evaluasi untuk kebutuhan penyempurnaan.
2. Pengelolaan *assets* TI yang terdistribusi di Kantor Cabang.
3. Penyusunan prosedur penggunaan, pengoperasian serta pemeliharaan computer dan kelengkapannya.
4. Pengolahan data Kantor Cabang di wilayahnya.

m. Fungsional Pengendali

1. Rencana kerja pengendalian mutu operasional Kantor Cabang.
2. Koordinasi Audit Mutu Internal (*Opening Meeting*, Pelaksana Audit, dan *Closing Meeting*).
3. Penelitian analisa penilaian dan pengujian terhadap sistem dan prosedur.
4. Penelitian, analisa penilaian atas penyimpangan kegiatan operasional serta penyampaian saran- saran perbaikan.
5. Penyusunan laporan bulanan kepada Kepala Kantor Cabang Utama dengan tembusan kepada Direktur Utama.

n. Fungsional *Database Administrator*

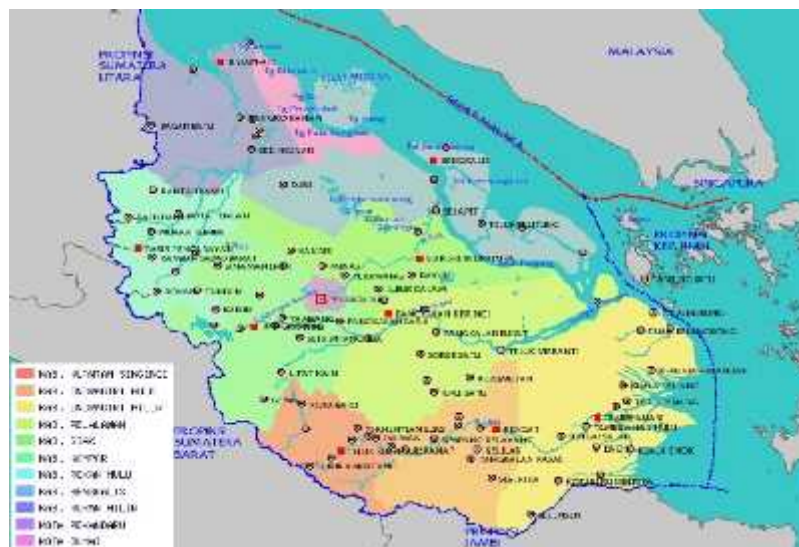
1. Pengelolaan *back-up recovery* data di Kantor Cabang.

2. Pengecekan integritas data di Kantor Cabang.

o. Fungsional *System Administrator*

1. Pemeliharaan terhadap sistem computer yang digunakan di Kantor Cabang.
2. Penyelesaian masalah yng berhubungan dengan sistem computer yang digunakan di Kantor Cabang.
3. Penyelenggaraan operasional layanan dukungan TI di Kantor Cabang.
4. Pengelolaan performansi/ kapasitas layanan dukungan TI di Kantor Cabang.

D. Wilayah Kerja



Dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan kepada seluruh peserta, PT. Taspen (Persero) mendirikan 45 Kantor Cabang yang tersebar di Ibukota Propinsi dan Kota / Kabupaten di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Kantor Cabang Pekanbaru yang dioperasikan sejak tanggal 1 Januari 1988, dengan

wilayah kerjanya meliputi Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau. Propinsi Riau meliputi Daerah Tingkat II yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rohan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kota Dumai.

Propinsi Kepulauan Riau meliputi Daerah Tingkat II yaitu, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang. Di samping itu PT TASPEN (Persero) Cabang Pekanbaru juga menyediakan lebih dari 121 titik pelayanan (lihat lampiran 2) yang bekerja sama dengan Perbankan dan Kantor Pos di wilayah Propinsi Riau dan wilayah Propinsi Kepulauan Riau. Sampai dengan akhir Desember 2004 Kantor Cabang Pekanbaru melayani 77.701 Peserta Aktif dan 22.852 Penerima Pensiun ditambah dengan para keluarganya.

A. Produk-produk dana pensiun pada PT. Taspen Pekanbaru

Penyaluran dana pensiun PT. TASPEN (PERSERO) mengacu ruang dalam lingkup Peraturan Pemerintah No. 25/1981 dan Peraturan Pemerintah No. 26/1981 yaitu sebagai penyelenggara Asuransi Sosial, termasuk Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT), bagi Pegawai Negeri Sipil dan BUMN/BUMD.

Selain itu menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2008 pasal 1 ayat (1) tentang tata cara perhitungan,

penyediaan pencairan dan pertanggung jawaban dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT. TASPEN (PERSERO), menyebutkan bahwa:³

“Dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) adalah Belanja Pensiun, Unfunded Liability Tabungan Hari Tua, Cadangan Perubahan Sharing dan Biaya Cetak Dapem”.

1. Program Tabungan Hari Tua (THT)

Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah suatu Program Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia Pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian

- Asuransi Dwiguna

Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada saat mencapai usia pensiun ataupun bagi ahli warisnya pada saat peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.

Para peserta Program Asuransi Dwiguna juga memperoleh Asuransi Kematian tanpa harus menambah iuran. Program Asuransi Kematian adalah suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta apabila istri/suami/anak meninggal dunia atau kepada ahli waris peserta apabila peserta meninggal dunia. Jadi asuransi kematian merupakan asuransi jiwa seumur hidup bagi Pegawai Negeri Sipil dan istri atau suami, kecuali bagi janda/ duda Pegawai Negeri Sipil dan istri atau suami, yang menikah lagi. Sedangkan bagi anak

³<http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%2071%202008%20>

asuransi kematian merupakan asuransi yang berjangka yang belum mencapai usia 21 tahun atau 25 tahun bagi yang sudah menikah dan masih belajar secara formal.

Selain itu bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun atau bukan karena meninggal dunia akan memperoleh pembayaran sekaligus dalam bentuk Asuransi Nilai Tunai.

Setiap peserta Program Asuransi Dwiguna diwajibkan membayar iuran sebesar 3.25% dari penghasilan sebulan (gaji, tunjangan istri dan tunjangan anak) kepada PT. TASPEN (PERSERO).

- Peserta Program Tabungan Hari Tua
 - a. Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil Departemen Hankam
 - b. Pejabat Negara
 - c. Pegawai BUMN/BUMD

- Asuransi Multiguna Sejahtera

Program Asuransi Multiguna Sejahtera adalah pengembangan dari Asuransi Dwiguna dengan penambahan manfaat bagi peserta berupa manfaat berkala, disamping manfaat THT dan manfaat nilai tunai. Besarnya manfaat berkala disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta. Program ini telah diikuti oleh pegawai beberapa BUMN/BUMD.

- Asuransi Ekaguna Sejahtera

Program Asuransi Ekaguna Sejahtera menawarkan manfaat THT saja kepada peserta yang ingin membatasi kewajiban iurannya. Program ini juga telah diikuti oleh pegawai beberapa BUMN/BUMD.

2. Program Pensiun

Program Pensiun adalah suatu program yang bertujuan untuk memberikan jaminan hari tua kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa- jasa dan pengabdianya kepada negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang No.11 Tahun 1969 tentang pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu menurut Donald E. Kieso dalam bukunya *Intermediate Accounting* seri ke- 8 menyebutkan bahwa:⁴

“Program pensiun (*pension plan*) adalah sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa- jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja”.

- Peserta Program Pensiun
 - a. Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pejabat Negara.
 - c. Penerima pensiun TNI/POLRI yang pensiun sebelum 1 April 1989.
 - d. Penerima tunjangan Veteran RI.
 - e. Penerima tunjangan perintis Kemerdekaan Republik Indonesia/
Komite Nasional Indonesia Pusat.

⁴ <http://kseicios.blogspot.com/2011/01/blog-post.html>

- Kewajiban Peserta Program Pensiun
 - a. Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan (gaji pokok + tunjangan istri dan anak).
 - b. Memberi keterangan data diri dan keluarganya.
- Hak Peserta Program Pensiun
 - a. Pembayaran Pensiun Diri Sendiri.
 - b. Pembayaran Pensiun Janda/ Duda/ Yatim Piatu.
 - c. Pembayaran Pensiun Orang Tua.
 - d. Pembayaran Uang Duka Wafat.
 - e. Pembayaran Pensiun Terusan.

Peserta Taspen

Peserta PT. TASPEN (PERSERO) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian,⁵

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari:

- a. Pusat
- b. Daerah Otonom

2. Pejabat Negara, terdiri dari:

A. Eksekutif

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Menteri
- c. Duta besar
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur
- e. Bupati dan Wakil Bupati

⁵www.Taspen.com

- f. Walikota dan Wakil Walikota
- g. Gubernur BI

B. Non Eksekutif

- a. Ketua dan Wakil Ketua MPR
- b. Ketua, Wakil, dan Anggota DPR
- c. Ketua, Wakil, dan Anggota BPK
- d. Ketua, Wakil, dan Anggota DPA
- e. Ketua, Wakil, dan Anggota MA
- f. Ketua, Wakil, dan Anggota MK

3. Pegawai BUMN, terdiri dari:

- a. PN. DAMRI
- b. PT. INHUTANI
- c. Perum Garam
- d. PT. KAI
- e. PT. PLN
- f. PT. Telkom
- g. Perum Pegadaian
- h. PT. TABA Bukit Asam
- i. PT. Pelabuhan ratu IV
- j. PT. Pengerukan Indonesia
- k. PT. POSINDO
- l. PT. TASPEN (PERSERO)

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Dana Pensiun

Dana pensiun atau *pension fund* sebenarnya merupakan suatu institusi atau pranata yang berasal dari sistem hukum Anglo-Amerika. Banyak pengertian dana pensiun, namun berikut ini akan dikemukakan beberapa diantaranya, menurut David L. Scott *pension funds is a financial institution that controls assets and disburses income to people after they have retired from gainful employment*; menurut FE Perry *pension fund is an investment maintained by companies and other employers to pay the annual sum required under the business or organization's pension scheme*¹.

Dari definisi-definisi tersebut terlihat bahwa dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang disebut *trust* sedangkan pengelolanya disebut *trustee* atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut.²

¹ Miftah, Thoha, *Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) Cet. Ke.4, h. 46-53

² Veithzal, Rivai dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada h.1072

Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.³

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah.

Program dana pensiun merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh pemberi kerja (pemerintah atau perusahaan) untuk menyediakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan Karyawan atau Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja, yang berupa pembayaran setiap bulan setelah karyawan atau pegawai yang bersangkutan pensiun.⁴

B. Jenis – jenis Kelembagaan Pensiun

Ada 3 hal yang menjadi dasar pertimbangan dasar pemensiunan :

1. Memelihara efisiensi organisasi

Program pemensiunan merupakan salah satu langkah yang penting dan tidak merugikan anggota yang berangkutan dalam rangka memelihara dan meningkatkan efisiensi organisasi.

³Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers. H.325

⁴Iman Sjahputra Tunggal,Tanya Jawab Aspek Hukum Dana Pensiun di Indonesia, (Jakarta:Harvarindo, 1999), h 5

2. Membuka kesempatan promosi jabatan

Dengan adanya program pemensiunan, dapat lebih matang direncanakan program promosi bagi tenaga-tenaga potensial untuk menduduki tempat-tempat yang ditinggalkan karena program pemensiunan tersebut.

3. Menepati proses alamiah

Secara alamiah usia pegawai makin lama makin lanjut, namun daya kemampuan fisik dan mental rohani semakin menurun.

Jenis Kelembagaan Dana Pensiun⁵

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, dan untuk menyelenggarakan PPMP atau PPIP bagi kepentingann sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)⁶

Yang dimaksud dengan dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan,

⁵ Somitra Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, 2010), h 295-296

⁶ Wahbah Zuhaili, “*Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*” hlm 5 - 8

baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja dari karyawan atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Pegawai Negeri yang mendapat hak pensiun adalah :

Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat berhak menerima pensiun jika pada saat pemberhentiannya :

- a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.
- b. Oleh badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Depkes berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan Pegawai Negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya diatas.
- c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya empat tahun dan oleh pejabat atau badan yang ditunjuk Depkes

Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3/1992). Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program

pensiun swasta yang ditanggungjawab oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/1997), dan ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan (Kepres No. 8/1977). Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda.

Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan risiko.⁷

Sedangkan untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah, dalam konteks regulasi misalnya. Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, berbeda halnya dengan dana pensiun syariah, menurut seorang konsultan

⁷Andri, Soemitra. *Op Cit.* h.291

Ekonomi Syariah, yang juga seorang praktisi, Izzuddin Abdul Manaf, Lc. MA. Belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus. Hal ini pula lah yang menjadi salah satu faktor lambatnya pertumbuhan dana pensiun syaria'ah di Indonesia.⁸

C. Tujuan dan Manfaat Dana Pensiun

a. Bagi Pemberi Kerja

Jika dipandang dari sisi pemberi kerja, tujuan penyelenggara dana pensiun adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban moral

Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Tenaga kerja tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai faktor produksi. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki masa pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena

⁸Maulana Farizil Qudsi.2010. <http://ib.erasmuslim.com/2010/05/14/dana-pensiun-syariah-kurang-perhatian/> diposting pada tanggal 14 Mei 2011

itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikuti atau membentk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya.

2. Loyalitas

Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.

3. Kompetisi pasar tenaga kerja

Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas. Di era yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan bersaing untuk mendapatkan tenaga yang profesional. Salah satu alat pengikat bagi karyawan yang berkualitas adalah tawaran manfaat pensiun pada karyawan tersebut.

b. Bagi Karyawan

Jika dipandang dari sisi karyawan, tujuan penyelenggara dana pensiun adalah sebagai berikut:

1. Rasa aman terhadap masa yang akan datang

Karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomis karena penghasilan yang ia terima memasuki masa pensiun. Harapan ini akan memengaruhi kinerja saat ini, pada saat ia masih produktif.

2. Kompensasi yang lebih baik

Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia nikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

Pada dasarnya dana pensiun sangat membantu kehidupan Pegawai maupun tenaga kerja pada saat tidak bekerja. Manfaat dana pensiun tersebut adalah:

a) Tenaga kerja (pegawai atau karyawan), sebagai pihak yang menjadi obyek penyelenggaraan program pensiun, berkepentingan terhadap program pensiun dalam dua hal:

1. Kesenambungan penghasilan karyawan atau pegawai pada saat tidak bekerja lagi
2. Adanya rasa aman bagi tenaga kerja mengingat adanya jaminan kesejahteraan penghasilan setelah tidak bekerja.

- b) Pemberi kerja berkepentingan terhadap program pensiun karena dengan rasa aman yang dimiliki karyawan atau pegawai, maka dari itu diharapkan kepada pegawai atau karyawan dapat meningkatkan kerjanya.
- c) Selain karyawan, pemerintah juga berkepentingan pula terhadap dana pensiun. Hal ini berkaitan dengan peranan dana pensiun yaitu untuk meringankan beban dan mensejahterakan para pensiun dalam masa tidak bekerja lagi.
- d) Sehubungan dengan adanya berbagai kepentingan diatas, pemerintah memberikan dukungan yang nyata kepada Dana Pensiun dalam bentuk pemberian fasilitas penundaan pangeanaan pajak penghasilan dengan tujuan agar dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan perekonomian nasional.
- e) Dukungan nyata pemerintah terhadap Dana Pensiun Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Pajak penghasilan. Yang berisikan bahwa Dana Pensiun merupakan penghasilan yang ditunda menikmatinya, tidak dikenakan pajak penghasilan agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, untuk kesejahteraan anggota pensiun.⁹

Program dana pensiun merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh pemberi kerja (pemerintah atau perusahaan) untuk menyediakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan karyawan selama

⁹ Amin Widjaja Tunggal, *Dasar-Dasar Akuntansi Dana Pensiun*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996) Cet. Ke-1, h.34-35

bertahun-tahun bekerja diperusahaan atau dinas terkait, yang berupa pembayaran setiap bulan setelah karyawan/pegawai yang bersangkutan pensiun.¹⁰

D. Program Dana Pensiun Syariah

Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya.

Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah:

1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha
2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah
3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah
4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp 100.000
5. Menyerahkan copian kartu identitas diri dan kartu keluarga
6. Membayar biaya pendaftaran
7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa
8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah.

¹⁰ *Ibid*

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain:

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
3. Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:
 - a) Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
 - b) Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

Para peserta DPLK Syariah memiliki beberapa hak, antara lain:

1. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara usia 45 s/d 65 tahun
2. Batas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi
3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun/statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan
5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya

6. Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan
7. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain
8. Memperoleh manfaat pensiun.

Secara garis besar tujuan dana pensiun adalah sebagai upaya memelihara kesinambungan penghasilan pada waktu hari tua, yaitu pada saat yang bersangkutan tidak mampu bekerja lagi. Hal ini sangat positif sekali dan akan dapat melahirkan kesejahteraan bagi yang bersangkutan.

Penyaluran dana pensiun yang sesuai dengan ajaran islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.

Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan:

1. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota taspen dan Askes, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah

2. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah.
3. Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

Untuk itu, kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Kebijakan dan program tersebut diharapkan mencukupi untuk dapat mendorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia bagi dana pensiun syariah. Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh stakeholder dana pensiun syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung jawab, dan kompetensi masing-masing.

Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi diantaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:

1. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road map strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh

sedikit pun dalam kebijakan dan strategi pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.

2. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksa dana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus dan mendetail.
3. Ketentuan Investasi langsung dalam UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (Mudharabah muqayadah/restricted investment) yang berpotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk mudharabah muqayadah merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan batas maksimum pemberian kredit.

Instrumen investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan ke dalam revisi UU Dana Pensiun. DPLK Syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan ditanam dalam bentuk obligasi, saham, dan reksa dana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang

sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa depan yang cerah.¹¹

Berdasarkan hal tersebut tentunya jelas bahwa dana pensiun tidaklah bertentangan dengan ketentuan syariah Islam, Sebab secara jelas dapat dikemukakan bahwa dana pensiun mempunyai manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.¹²

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dana pensiun tersebut adalah untuk mencapai kemajuan hidup dan tujuan hidup. Untuk mencapainya diperlukan kerjasama dan kegotongroyongan sebagaimana ditandaskan dalam Al-Quran.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“ *Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan.*” (QS.Al-Maidah:2)

Dapat ditambahkan bahwa peserta dana pensiun sekaligus telah berupaya untuk mencukupi nafkah hidupnya, terutama pada waktu pensiun nantinya(lazimnya masa sesudah pensiun adalah masa yang sulit dibandingkan pada waktu masa bekerja, sebab produktivitas sudah menurun). Dalam hal mencukupi nafkah ini disebutkan dalam sebuah hadits bahwa

“ *Orang mukmin yang bekerja untuk mencukupkan nafkah hidup(termasuk pada waktu pensiun) dicintai oleh Allah.*”(HR. Tabrani dari Ibnu Umar)

Selain itu dalam hadits yang lain ditegaskan kembali oleh Rasulullah bahwa

¹¹ *Ibid* hlm 301-304

¹² K Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2004) h 88-90

“Tidak seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik daripada yang dia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari hasil tangannya.” (HR.Bukhari)

Seterusnya ditegaskan juga oleh Rasulullah,
“Barangsiapa menjadi beban dari kerja tangannya sendiri, diampunilah ia (dosanya).” (HR.Bukhari Muslim)

Berdasarkan kepada ketentuan hadits di atas jelas terlihat bahwa walaupun seseorang telah memasuki usia pensiun sebaiknya dia hidup (makan) dari hasil kerja (pencahariannya) sendiri. Hal itu tentunya dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan dana pensiun (mempersiapkan bekal untuk hari tua)

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan dana pensiun ini merupakan hal yang baik untuk menyahuti penegasan Rasulullah tersebut karena sesuai dengan prinsip agama Islam

E. Dana Pensiun Menurut Ekonomi Islam

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada Abad ke 7 Masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran Romawi. Kemunculan itun ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan. Kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupann social lainnya termasuk ekonomi berkembang secara menakjubkan¹³

Fakta sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik

¹³ Edwin Nasutin, Mustafa, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h 1-2

dalam social, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.

Sebagaimana Firman-Nya

.....وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

“.... dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu....” (QS.An-Nahl:89)

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Maidah : 3 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ لِلَّهِ غُفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣﴾

“ Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku- ridhai Islam itu juga agama bagimu.”

Firman Allah SWT diatas jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai system tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materiil maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami, sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan system dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunah.

Islam menuntut umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang muslim yang taat

menjalankan shalat lima waktu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang ajaram Islam

Dalam mewujudkan kehidupan ekonomi sesungguhnya Allah telah menyediakan sumber daya-Nya di alam raya ini. Allah mempersilahkan manusia untuk memanfaatkannya, sebagaimana Firman-Nya dalam QS.Al-Baqarah :29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“ Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Islam mempunyai pandangan yang pasti mengenai harta dan kegiatan ekonomi mengenai pemilik mutlak harta / segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia adalah hanya bersifat relatif, sebatas yang menjalankan amanah mengelola, memanfaatkan sesuai ketentuan.

(Q.S 57. Al-Hadid : 7)

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ
ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

“ Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

BAB IV

PENYALURAN DANA PENSIUN PADA PT.TASPEN PEKANBARU

A. Mekanisme penyaluran dana pensiun di PT.TASPEN Pekanbaru

1. Prosedur pengajuan permohonan dana pensiun di PT. TASPEN Pekanbaru

Seseorang yang mau memperoleh dana pension terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pensiun (SP4A). adapun syarat-syarat yang dilengkapi antara lain:

- ✓ Pas foto permohonan 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar
- ✓ Pas foto Istri/Suami pemohon 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar
- ✓ Foto copy KTP yang masih berlaku 3 lembar
- ✓ Foto copy Rek. Bank 3 lembar (Khusus pembayaran melalui rekening Bank/Giro Pos)
- ✓ Asli formulir SP4A dan 2 lembar foto copy yang sudah ditandatangani
- ✓ Asli petikan SK pensiun berpasfoto dan 2 lembar foto copynya
- ✓ Asli tembusan SK pensiun berpasfoto untuk PT. Taspen (Persero)
- ✓ SKKP Asli definitive dari KPKN/Pemda dan lembar kedua dan foto copy 1 lembar
- ✓ Foto copy SK pengangkatan pertama/Carpeg 3 lembar
- ✓ Foto copy Karpeg dan Kartu Taspen 3 lembar

- ✓ Surat Pernyataan & Riwayat dan SK Kepangkatan (Bagi PNS Gol IV a kebawah yang belum memperoleh Uang Muka Taperum + Foto Copy 2 lembar
- ✓ Asli formulir SP3 R dan 2 lembar foto copy yang telah ditandatangani (Khusus Pembayaran melalui Rek. Bank/Giro Pos)

Selain beberapa hal di atas, ada pula hal- hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan klim, diantaranya adalah:

- a. Apabila pembayaran dilakukan secara langsung di kantor Taspen, harus memperlihatkan:
 1. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
 2. Asli Surat Keputusan (SK) Pensiun.
- b. Apabila pembayaran tidak langsung (transfer), harus melampirkan fotocopy Buku Rekening Bank yang masih aktif, dan nama di buku itu harus sama dengan nama yang ada di SK Pensiun.
- c. Bagi anak yang tertunjang berusia 21 s/d 25 tahun, agar melampirkan:
 - Surat keterangan sekolah yang masih berlaku sesuai tahun ajaran dengan catatan yang bersangkutan tidak menerima beasiswa.
 - Surat keterangan belum menikah/ belum bekerja dari Lurah/ Kepala Desa.

Dalam hal pemberian pensiun bagi para nasabah, ada beberapa bagian utama yang sangat terkait dalam proses tersebut, yaitu:

1. Bank- bank yang bekerjasama dengan PT. TASPEN
2. Pos
3. Kantor Cabang Utama Pekanbaru
4. Bagian Administrasi Keuangan
5. Kasir/ Teller
6. Bagian Verifikasi
7. Bagian klim.

2. Proses analisa persetujuan pembayaran dana pensiun

Proses pemberian pensiun adalah langkah- langkah yang harus dilakukan oleh nasabah Taspen untuk mengambil uang pensiunnya. Dalam hal ini terdapat tiga cara pengambilan uang pensiun dalam Taspen, yaitu: secara langsung (datang ke PT. TASPEN (PERSERO), transfer via bank (bank- bank yang bekerja sama dengan Taspen), via cek pos. Dalam pemberian pensiun secara langsung ada syarat- syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya:

a. Mengisi formulir

Peserta pensiun akan diberikan beberapa lembar formulir untuk diisi, yaitu:

1. SP4A (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Pertama)
model formulir A.
2. SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Rekening).

b. Melampirkan

Setelah mengisi formulir yang diberikan, para peserta pensiun diwajibkan mengembalikan formulir tersebut dengan melampirkan:

1. Asli tembusan SK Pensiun ber-pas photo.
2. Asli & lembar II SKPP definitif dari Pemda.
3. Fotocopy SK capeg dilegalisir instansi.
4. Fotocopy karpeg dan KPT (Kartu Peserta Taspen).
5. Pas photo pemohon terbaru ukuran 3 x 4 cm, 3 (tiga) lembar.
6. Pas photo istri/ suami terbaru ukuran 3 x 4 cm, 1 (satu) lembar.
7. Asli surat keterangan masih sekolah/ kuliah terbaru untuk anak berusia 21 s/d 25 tahun.
8. Fotocopy KTP pemohon.
9. Surat keterangan penghasilan apabila istri/ suami pegawai negeri/ pensiunan.
10. Fotocopy nomor rekening bank atas nama sendiri sesuai pensiun apabila pembayaran melalui bank.

c. Membawa SK asli pensiun.

Peserta pensiun wajib membawa SK asli pensiun dari instansi tempat dia bekerja sebagai bukti otentik bahwa yang bersangkutan memang benar- benar telah pensiun.

d. Pengajuan berkas rangkap 2 (dua)

Berkas- berkas yang telah dilengkapi wajib dibuat rangkap 2 (dua) sebagai dokumentasi bagi pihak peserta yang bersangkutan maupun bagi pihak PT. TASPEN (PERSERO).

Setelah peserta melengkapi dokumen- dokumen tersebut, maka peserta pensiun dapat langsung mengambil pensiunnya dengan cara:¹

1. Menuju bagian *customer service*, karena pada bagian ini kelengkapan dokumen akan diperiksa dan diteliti, selanjutnya akan dilakukan rekam data, setelah itu baru dilakukan perhitungan yang kemudian diserahkan ke bagian verifikasi.
2. Pada bagian verifikasi, berkas yang ada kembali diperiksa apakah layak untuk ditindak lanjuti atau tidak, jika tidak akan kembali dilakukan penelitian, jika ya maka berkas tersebut langsung diserahkan ke bagian otorisator.
3. Jika tidak memenuhi persyaratan peserta pensiun diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan yang tidak lengkap agar dapat diproses kembali setelah persyaratan benar-benar lengkap.
4. Setelah ditanda tangani oleh bagian otorisator, maka pencetakan voucher pembayaran dapat dilakukan.
5. Voucher yang telah dicetak akan ditanda tangani pada bagian pengesahan.

¹ Herman (kabid Data Peserta&Pemasaran PT. Taspen), Wawancara, Tgl 23 Februari 2012, PT. Taspen Pekanbaru

6. Setelah disahkan voucher tersebut diberikan kepada bagian kasir, yang selanjutnya akan dibayarkan ke peserta pensiun.

Berikut data pensiun PT. TASPEN (PERSERO) tahun 2011 periode Januari – Desember 2011

Tabel IV.1
Data Pensiun PT. Taspen Pekanbaru Tahun 2011
(Periode Januari - Desember)

BULAN	PESERTA PENSIUN
JANUARI	188
FEBRUARI	341
MARET	178
APRIL	202
MEI	198
JUNI	155
JULI	235
AGUSTUS	194
SEPTEMBER	242
OKTOBER	219
NOVEMBER	191
DESEMBER	749
TOTAL	3092

Sumber : PT.TASPEN PEKANBARU

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peserta susulan pensiun mengalami peningkatan pada bulan Desember sebanyak 749 peserta pensiun, ini

membuktikan bahwa dalam akhir tahun banyak sekali peserta yang pensiun di karenakan faktor tertentu diantaranya usia, masa kerja dan dan lain sebagainya.

PT.TASPEN (PERSERO) PEKANBARU menyalurkan dana pensiun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya KANTOR POS, BANK BRI, BANK BTPN, BANK RIAU, BANK BUKOPIN DAN BANK BPD yang tersebar ke berbagai cabang wilayah kerja. Berikut data pembayaran pensiun PT. Taspen Pekanbaru pada berbagai pihak yang bekerjasama.

Tabel IV.2

Data Pembayaran pensiun PT. Taspen Pekanbaru pada berbagai pihak bekerjasama

BULAN	PT. Pos	BRI	BPD	BTPN	BUKOPIN	B.RIAU	JUMLAH
JAN	63	66	0	13	0	46	188
FEB	124	106	74	37	0	0	341
MAR	56	73	0	14	0	35	178
APR	76	73	0	19	0	34	202
MEI	65	69	0	20	0	44	198
JUN	60	78	0	0	0	17	155
JUL	69	110	0	25	0	31	235
AGUST	52	75	0	19	3	45	194
SEP	75	75	0	28	3	61	242
OKT	68	89	0	14	4	44	219
NOP	70	66	0	16	0	39	191
DES	610	70	50	17	2	0	749
TOTAL	1388	950	124	222	12	396	3092

Sumber : Data primer diolah, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa peserta pensiun menerima dana pensiun terbanyak melalui Kantor Pos sebanyak 1388 peserta (44,89%), Bank BRI sebanyak 950 peserta (30,72), Bank Riau sebanyak 396 peserta (12,81%), Bank BTPN sebanyak 222 peserta(7,18%), Bank BPD sebanyak 124 peserta (4,01%) dan yang paling sedikit bank BUKOPIN sebanyak 12 Peserta (0,39)%.

Pendistribusian pembayaran dana para peserta pensiun PT.Taspen Pekanbaru pada pihak terkait dapat dilihat tabel 4 berikut ini.

Tabel IV.3
Pendistribusian pembayaran dana para peserta pensiun
PT.Taspen Pekanbaru

BULAN	Tempat Pembayaran Dana <i>(dalam Rp)</i>						JUMLAH
	KANTOR POS	BRI	BPD	BTPN	BUKOPIN	B.RIAU	
JAN	90.992,300	107.892,600	000.000,000	20.299,300	000.000,000	76.710,800	295.895,000
FEB	212.253,400	207.982,100	144.511,400	66.804,500	000.000,000	0,000	631.551,400
MAR	80.328,000	125.736,200	000.000,000	23.668,900	000.000,000	61.533,600	291.266,700
APR	107.243,300	126.981,100	000.000,000	35.353,400	000.000,000	66.242,000	208.838,700
MEI	95.109,700	114.508,600	000.000,000	38.688,200	000.000,000	78.794,800	327.101,300
JUN	108.942,700	139.579,300	000.000,000	0,000	000.000,000	50.864,400	299.386,400
JUL	119.077,700	214.841,100	000.000,000	50.598,700	000.000,000	63.547,600	448.065,100
AGUST	85.892,200	145,869,700	000.000,000	34.829,700	8.296,700	98.149,100	227.167,700
SEP	116.210,800	142.570,600	000.000,000	56.184,700	5.768,700	119.509,000	440.243,800
OKT	111.000,800	160.663,500	000.000,000	26.393,500	10.707,600	100.601,200	409.366,600
NOP	112.412,800	126.160,300	000.000,000	32.070,900	000.000,000	82.323,500	352.967,500
DES	891.936,300	128.467,200	102.366,200	39.372,600	4.208,600	000.000,000	1.166.350,900
TOTAL	2.131.400,000	1.468.401,500	246.877,600	424.264,400	28.981,600	798.276,000	5.098.201,100

Sumber : Data primer diolah, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dana pensiun PT.Taspen Pekanbaru yang disalurkan paling banyak pada Kantor Pos sebesar Rp.2.131.400,000 untuk 1388

peserta, Bank BRI sebesar Rp.1.468.401,500 untuk 950 peserta, Bank Riau sebesar Rp.798.276,000 untuk 396 peserta, Bank BTPN sebesar Rp.424.264,400 untuk 222 peserta, Bank BPD sebesar Rp.246.877,600 untuk 124 peserta dan yang paling sedikit bank BUKOPIN sebesar Rp. 28.981,600 untuk 12 Peserta.

3. Perhitungan pembayaran dana pensiun

Berikut ini adalah ilustrasi pembayaran pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil golongan 3/C adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4
Tabel Rumus Perhitungan Hak Peserta Pensiun

PERIODE	RUMUS	DASAR HUKUM
01 April 1985 s.d. 30 Juni 1991	$(0,435 \times MI + 0,10 N/12) \times THP$	SK Menteri Keuangan RI No.113/KMK.011/1987 Tgl 04 Maret 1987
01 Juli 1991 s.d. 31 Desember 2001	$(0,55 \times MI) \times THP$	SK Menteri Keuangan RI No.45/KMK.013/1992 Tgl 14 Januari 1992
01 Januari 2002 s.d. Sekarang	$(0,60 \times MI1 \times P1) + (0,60 \times MI2 \times (P2 - P1))$	SK Menteri Keuangan RI No.478/KMK.06/02 Tgl. 19 November 2002

Penjelasan: MI 1 : Masa Iuran 1

P1 : Pembayaran 1

MI 2 : Masa Iuran 2

P2 : Pembayaran 2

N : Masa Kerja

THP : Total Hitung Penghasilan

ILUSTRASI PEMBAYARAN PENSIUN

GOLONGAN = 3C

PENSIUN POKOK = Rp. 1.915.900

KODE JIWA = 1100

a. PERINCIAN HAK PENSIUN

1. Pensiun Pokok	=	Rp. 1.915.900
2. Tunjangan Istri (10 %)	=	Rp. 191.590 (10 % X Penpok)
3. Tunjangan Anak (@ 2 %)	=	Rp. 38.318 (2% X Penpok)
4. Tunj.Beras (@ Rp. 41.580	=	Rp. 83.160 (2 X Rp.41.580,-)
5. Tunj.Khusus PPh Pasal 21	=	Rp. 47.729
6. Pembulatan	=	<u>Rp. 99</u> +
Jumlah Kotor	=	Rp 2.276.706

b. POTONGAN-POTONGAN

1. PPh Pasal 21	=	Rp. 47.729-
2. Asuransi Kesehatan	=	Rp. 42.149 ,- (Penpok + Tunj.Istri +Tunj.Anak)
3. Lain-lain	=	Rp. 0,-
4. Sewa Rumah	=	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Potongan	=	Rp. 89.878

c. JUMLAH DIBAYARKAN = Rp. 2.186.828,-

B. Faktor Pendorong dan penghambat penyaluran dana pensiun di Taspen Pekanbaru

Faktor pendorong penyaluran dana pensiun pada PT. Taspen Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Saat ini Taspen ditunjuk pemerintah sebagai pengelolaan dana pensiun dan THT bagi PNS, sehingga PT. Taspen Pekanbaru sehingga didirikan guna membantu PT. Taspen Pusat dalam menyalurkan dana pensiun bagi anggotanya
- b. Di karenakan waktu penyaluran dari pusat ke daerah memerlukan waktu yang cukup lama dan membuat dana pensiun tersebut terlambat di berikan oleh pensiunan.
- c. Banyaknya prosedur yang harus di lewati dalam penyaluran dana pensiun sehingga di dirikanlah PT. Taspen Pekanbaru sebagai jembatan mempermudah peserta pensiun dalam menyampaikan aspirasinya.

Sedangkan faktor penghambat untuk menyalurkan dana pensiun di PT. Taspen Pekanbaru ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan transaksi para peserta pensiun masih minim untuk datang ke PT. Taspen untuk melakukan proses pembayaran dana pensiun sehingga nasabah memilih menggunakan jasa Bank/Giro Pos sebagai tempat melakukan transaksi
- b. Masih minim pengetahuan peserta program dana pensiun tentang program yang akan di ajukan sehingga pihak penyalur harus

memberikan penjelasan agar para peserta dapat memilih program apa yang akan ia pilih.

c. Jarak tempat tinggal peserta pensiun yang jauh bagi nasabah luar daerah dengan kantor pusat sehingga susah dalam melakukan transaksi yang diharapkan dengan tepat waktu.

Namun kini Indonesia dengan 300 pengelola dana pensiun. Selain PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), pemerintah membebaskan badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta mengelola sendiri dana pensiun pegawainya.

Minimnya pengelolaan dana tersebut berakibat buruk bagi semua pihak. Bagi PNS, jumlah dana pensiun dan THT yang diterima setelah purna tugas menjadi sangat kecil karena dana kelolaan PT Taspen sangat terbatas. Bagi pemerintah juga rugi karena kehilangan kesempatan untuk memupuk Dana Simpanan Nasional dalam jumlah besar.

Bagi karyawan swasta tidak ada jaminan kepastian akan menerima dana pensiun dan THT saat berhenti bekerja. Jika perusahaannya masih berdiri, mereka akan mendapatkan pesangon. Namun, kalau bangkrut, jangan harap ada sepeser pun uang yang diterima pekerja itu. Pengalaman itu terjadi saat Indonesia dilanda krisis moneter 1997, saat banyak perusahaan yang bangkrut dan berusaha melepas tanggung jawab atas kesejahteraan karyawan yang diberhentikan bekerja.

Saat ini Taspen ditunjuk pemerintah sebagai pengelolaan dana pensiun dan THT bagi PNS. Jamsostek mengelola THT bagi karyawan swasta. Untuk dana pensiun pekerja swasta, pemerintah membebaskan swasta dan BUMN memilih. Lemahnya jaminan kesejahteraan PNS dan karyawan swasta bukan hanya disebabkan pengelolaan dana pensiun dan THT yang tercerai-berai, tetapi juga sikap pemerintah sendiri yang tetap mempertahankan sistem pembayaran iuran secara konvensional bagi PNS, yakni *pay as you go*. Artinya, iuran dana pensiun dan THT dibayar oleh PNS, sementara pemerintah sebagai pemberi kerja tidak mengiur.

Setiap bulan, PNS harus menyisihkan 11 persen dari gaji pokoknya untuk iuran THT sebesar 3,25 persen, 4,75 persen untuk iuran dana pensiun (keduanya dikelola Taspen); lalu 2 persen untuk asuransi kesehatan yang dikelola Askes, dan 1 persen untuk iuran uang muka pemilikan rumah yang dikelola Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Pemerintah hanya mengiur 2 persen. Itu pun hanya untuk asuransi kesehatan yang dikelola Askes.

Selama ini pembayaran dana pensiun dilakukan dengan pola berbagi beban antara pemerintah dan PT Taspen. Tahun 2007, pemerintah berkontribusi 85,5 persen dari kebutuhan dana pensiun per tahun, dan 14,5 persen dibayar Taspen. Tahun 2008, kontribusi itu berubah menjadi 92,5 persen berbanding 7,5 persen.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang penyaluran dana pensiun di PT. Taspen Pekanbaru.

Tabel IV.5
Tanggapan responden tentang adanya program dana pensiun pada
PT. Taspen di Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat setuju	6	6,18 %
2	Setuju	74	76,29 %
3	Cukup setuju	17	17,53 %
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		97	100 %

Sumber data: olahan angket no. 1

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dari 97 responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 6 orang (6,18%), yang menyatakan setuju berjumlah 74 orang (76,29%), sedangkan yang menyatakan cukup setuju berjumlah 17 orang (17,53%). Ini berarti keberadaan program dana pensiun yang dikelola oleh PT. Taspen Pekanbaru memberikan kontribusi yang baik bagi PNS di Pekanbaru.

Tabel IV.6
Tanggapan responden tentang rentang waktu menjadi pensiunan
Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	1 s/d 5 Tahun	43	44,33 %
2	6 s/d 10 Tahun	35	36,09 %
3	11 s/d 15 Tahun	19	19,58 %
4	16 s/d 20 Tahun	-	-
5	> 20 Tahun	-	-
Jumlah		97	100 %

Sumber data: olahan angket no. 2

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden yang mempunyai waktu menjadi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu: responden yang waktu menjadi pensiunnya 1 /sd 5 Tahun berjumlah 43 orang (44,33 %), responden yang waktu menjadi pensiunnya 6 s/d 10 Tahun berjumlah 35 orang (36,09 %) sedangkan yang waktu menjadi pensiunnya 11 s/d 15 Tahun berjumlah 19 orang (19,58%).Dapat disimpulkan bahwa pensiun PNS yang memanfaatkan program dana pensiun pada PT.Taspen Pekanbaru relatif baru berkisar 1 hingga 10 Tahun pensiun.

Tabel IV.7
Tanggapan responden tentang penyaluran dana pensiun pada
PT. Taspen di Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat memuaskan	53	54,64 %
2	Memuaskan	37	38.14 %
3	Cukup memuaskan	7	7,22 %
4	Tidak memuaskan	-	-
5	Sangat tidak memuaskan	-	-
Jumlah		97	100 %

Sumber data: olahan angket no. 3

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat memuaskan berjumlah 53 orang (54,64%), yang menyatakan memuaskan berjumlah 37 orang (38,14 %) sedangkan yang menyatakan cukup memuaskan berjumlah 7 orang (7,22%). Ini berarti penyaluran dana pensiun yang dikelola oleh PT.Taspen memberikan kepuasan dalam hal pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel IV.8
Tanggapan responden tentang prosedur penyaluran dana pensiun pada
PT.Taspen Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat mudah	79	81,44 %
2	Mudah	12	12,38 %
3	Cukup mudah	6	6,18 %
4	Tidak mudah	-	-
5	Sangat tidak mudah	-	-
Jumlah		97	100 %

Sumber data: olahan angket no. 4

Dari tabel diatas dilihat dari 97 orang responden yang menyatakan prosedur penyaluran dananya sangat mudah berjumlah 79 orang (81,44 %) dan yang menyatakan prosedur penyaluran dana pensiunnya mudah berjumlah 12 orang (12,38 %), sedangkan yang menyatakan prosedur penyaluran dananya cukup mudah berjumlah 6 orang (6,18%). Dapat disimpulkan prosedur penyaluran yang diterapkan oleh PT.Taspen Pekanbaru sangat diminati.

Adapun responden yang menyatakan prosedur cukup mudah dikarenakan responden kurang memahami mekanisme dalam penerimaan dana pensiun.

Tabel IV.9
Tanggapan responden tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk
menjadi peserta program pensiun pada PT. Taspen Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat tidak memberatkan	23	23,71 %
2	Tidak memberatkan	61	62,89 %
3	Cukup memberatkan	13	13,40 %
4	Memberatkan	-	-
5	Sangat memberatkan	-	-
Jumlah		97	100 %

Sumber data: olahan angket no. 5

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 97 responden yang menyatakan sangat tidak memberatkan berjumlah 23 orang (23,71 %), responden yang menyatakan tidak memberatkan berjumlah 61 orang (62,89%), sedangkan yang menyatakan cukup memberatkan berjumlah 13 orang (13,40 %). Ini berarti setiap peserta program pensiun tidak dibertkan dengan prosedur dan persyaratan yang ada.

Adapun responden yang menjawab sangat tidak memberatkan dan tidak memberatkan ini dikarenakan peserta program bisa memenuhi secara mudah dan telah memiliki apapun prosedur dan persyaratan yang ditentukan untuk diserahkan langsung.

Tabel IV.10
Tanggapan responden tentang batasan usia lama menerima program dana pensiun pada PT.Taspen Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat setuju	16	16,49 %
2	Setuju	52	53,61 %
3	Cukup setuju	29	29,90 %
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		97	100 %

Sumber data: olahan angket no. 6

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju batasan usia lama menerima program dana pensiun berjumlah 16 orang (16,49 %), yang menyatakan setuju berjumlah 52 orang (53,61 %), sedangkan yang menyatakan cukup setuju berjumlah 29 orang (29,90 %). Ini berarti para peserta prorgam pensiun telah mempertimbangkan secara realitis dan seksama akan program tersebut.

Adapun responden yang menjawab cukup setuju dikarenakan usia responden sudah kurang produktif untuk melakukan aktivitas.

Tabel IV.11
Tanggapan responden tentang waktu pencairan dana pensiun oleh
PT.Taspen Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat cepat	31	31,96 %
2	Cepat	52	53,61 %
3	Cukup cepat	14	14,43 %
4	Tidak cepat	-	-
5	Sangat tidak cepat	-	-
Jumlah		97	100 %

Sumber data: olahan angket no. 7

Dari tabel diatas dilihat bahwa responden yang menyatakan waktu pencairan dana pensiun sangat cepat berjumlah 31 orang (31,96%), yang menyatakan cepat berjumlah 52 orang (53,61 %), sedangkan yang menyatakan cukup cepat berjumlah 14 orang (14,43 %). Ini berarti dalam pencairan dana tidak menggunakan waktu yang lama.

Responden yang menyatakan cukup cepat dikarenakan pada waktu pencairan peserta program pensiun tidak memberikan informasi perubahan data dan mutasi kerja, sehingga dana tidak sampai ketangan pensiun dan retur ke PT.Taspen Pekanbaru lagi.

Tabel IV.12
Tanggapan responden tentang penetapan waktu pengambilan dana pensiun
yang dicairkan oleh PT. Taspen Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat setuju	9	9,28 %
2	Setuju	53	54,64 %
3	Cukup setuju	35	36,08 %
4	Tidak setuju	10	10,31 %
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		97	100 %

Sumber data: olahan angket no. 8

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 9 orang (9,28 %), yang menyatakan setuju berjumlah 53 orang (54,64 %), yang menyatakan cukup setuju berjumlah 35 orang (36,08 %) sedangkan yang menyatakan tidak setuju berjumlah 10 orang (10,31 %). Ini berarti bahwa waktu pengambilan dana pensiun perlu diberikan batasan agar dana yang ada tidak membebani pihak pengelola.

Adapun responden yang menyatakan tidak setuju dikarenakan peserta memiliki ketersediaan dana lebih sehingga dana pensiun yang ada tidak begitu mendesak untuk dipergunakan.

Tabel IV.13
Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan oleh
PT. Taspen Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat baik	41	42,27 %
2	Baik	56	57,73 %
3	Cukup baik	-	-
4	Tidak baik	-	-
5	Sangat tidak baik	-	-
Jumlah		97	100 %

Sumber data: olahan angket no. 9

Dari tabel diatas diketahui bahwa yang menyatakan sangat baik berjumlah 41 orang (42,27 %) dan yang menyatakan baik berjumlah 56 orang (57,73 %). Ini berarti bahwa pelayanan yang dimiliki oleh PT. Taspen Pekanbaru sesuai dengan bidang keahliannya.

C. Penyaluran Dana pensiun berdasarkan perspektif Ekonomi Islam

Al-Quran juga menyatakan dalam beberapa ayat yang menyuruh kita untuk mempersiapkan masa depan. pada surat An-Nisa ayat 9, dinyatakan

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“ Dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya...”.

Di lain surat juga Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 240,

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجُنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ
فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

“Dan orang-orang yang akan mati diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah).

Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, dinyatakan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa-apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok...”

Dalam Surat Al-Maidah ayat 2, dinyatakan

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“ Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan.” (QS.Al-Maidah:2)

Nabi SAW pernah bersabda untuk mempersiapkan terhadap lima hal sebelum datangnya lima hal, yakni :

1. Masa muda sebelum datangnya masa tua
2. Masa sehat sebelum datang sakit
3. Kaya sebelum miskin
4. Lapang sebelum sempit
5. Hidup sebelum mati.

Nabi Yusuf AS, juga pernah menterjemahkan mimpi seorang raja pada jamannya untuk segera mempersiapkan diri akan datangnya kesusahan di masa depan. Dimana akan datang masa keemasan selama tujuh tahun dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama tujuh tahun.

Hal-hal tersebut di atas adalah dasar-dasar hukum yang digunakan untuk memberikan suatu alternatif solusi terhadap perencanaan keuangan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip islami.

Berdasarkan perspektif Ekonomi Islam bahwa pada prinsipnya setiap sesuatu dalam bermuamalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariah.

Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²

Dapat ditambahkan bahwa peserta dana pensiun sekaligus telah berupaya untuk mencukupi nafkah hidupnya, terutama pada waktu pensiun nantinya (lazimnya masa sesudah pensiun adalah masa yang sulit dibandingkan pada waktu masa bekerja, sebab produktivitas sudah menurun). Dalam hal mencukupi nafkah ini disebutkan dalam sebuah hadits bahwa

² A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007, Ed. Ke-1, Cet. Ke-2), h.130

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambil-lah nafkah yang cukup untukmu dan anak- anakmu dengan cara yang wajar.” (HR.Bukhori 4945)

Berdasarkan mekanisme pembayaran dana pensiun diatas maka dapat diambil suatu persepsi bahwa penyaluran dana pensiun di PT.Taspen Pekanbaru sesuai dengan syariat ekonomi islam yakni sistem *mudharabah mutlaqah*.

Sistem mudarabah yang ada di PT. Taspen Pekanbaru yakni dalam bentuk Deposito. *mudharabah mutlaqah* yaitu kerjasama antara pemilik dana (sahibul mal) dengan seorang (PT. Taspen Pekanbaru) yang akan mengelola dana tersebut (mudarib) dengan pembagian bagi hasil. Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah di PT. Taspen Pekanbaru juga diperbolehkan karena pengelolaannya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan sistem mudarabah dalam pemberian "bagi hasil" dan dalam pembagiannya nasabah sudah diberi tahu diawal sebelum berinvestasi

Maka praktek kontrak *mudharabah* pada perbankan Islam di Indonesia dalam pengembangan dan merealisasikan Khususnya di PT. TASPEN makna serta tujuannya didasarkan pada pengamatan dan penelitian yang ditinjau dari kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan umum syar'iah:

- a. Al-Qur'an dan sunah yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan kontrak *mudharabah* belum jelas terperinci.
- b. Landasan awal dari setiap muamalah dalam Islam adalah boleh, kecuali ada nas yang melarangnya.

- c. Yang menjadi dasar setiap kontrak transaksi dalam muamalah adalah tujuan-tujuan dan maksud-maksud yang berkaitan dengan maslahat umat, selama tidak bertentangan dengan nas.
- d. Bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat *mudharabah* yang ada merupakan persoalan ijtihadiyah.
- e. Kontrak *mudharabah* merupakan muamalah ekonomi yang menjadi dasarnya adalah hubungan manusia dengan manusia.
- f. Memelihara konsep fiqh tajribah
- g. Memanfaatkan sistem modern dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan, tanpa mengabaikan syariatnya.

Di dalam membangun suatu tamadun Islam, faktor ekonomi adalah kekuatan tambahan yang utama selain iman, ukhuwah, keselarasan dan kesepahaman. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, sirkulasi sampai konsumsi. Ini berarti bahwa ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan. Semua masalah sosial, politik, pendidikan bahkan ibadah sekalipun tidak terlepas dari persoalan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang penyaluran dana pensiun pada PT. TASPEN (PERSERO), dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penyaluran dana pensiun pada PT. TASPEN (PERSERO) dilakukan dengan cara terlebih dahulu para peserta program pensiun mengajukan permohonan dan melampirkan berkas-berkas yang telah ditentukan oleh penyalur untuk diproses dan diotorisatorkan menjadi anggota yang berhak menerima dana pensiun sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Faktor pendorong dalam penyaluran dana pensiun pada PT. Taspen Pekanbaru yakni: dikarenakan saat ini PT. Taspen ditunjuk pemerintah sebagai pengelolaan dana pensiun dan THT bagi PNS, sehingga PT.Taspen Pekanbaru didirikan guna membantu PT. Taspen Pusat dalam proses penyalurkan dana pensiun bagi seluruh anggotanya sedangkan faktor penghambat yakni masih minim pengetahuan peserta program dana pensiun tentang program yang akan di ajukan sehingga pihak penyalur harus memberikan penjelasan agar para peserta dapat memilih program apa yang akan ia pilih.
3. Menurut tinjauan ekonomi Islam mengenai penyaluran dana pensiun pada PT. Taspen Pekanbaru sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dimana PT. Taspen Pekanbaru menerapkan sistem *mudarabah mutlaqah* yakni dalam

bentuk deposito. *Mudarabah mutlaqah* yaitu kerjasama antara pemilik dana (sahibul mal) dengan seorang (PT. Taspen Pekanbaru) yang akan mengelola dana tersebut (mudarib) dengan pembagian bagi hasil. Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah di PT. Taspen Pekanbaru juga diperbolehkan karena pengelolaannya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan sistem mudarabah dalam pemberian "bagi hasil" dan dalam pembagiannya nasabah sudah diberi tahu diawal sebelum berinvestasi

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai implikasi dari hasil penelitian, yaitu:

1. Hendaknya penyaluran dana pensiun oleh PT.Taspen (Persero) agar lebih maksimal dengan menggunakan sistem syariah
2. Melihat prospek perkembangan dana pensiun syariah yang tergolong bagus maka sebaiknya pemerintah harus cepat tanggap mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat tersebut dan mendorong perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia.
3. Kepada sarjana Ekonomi Islam dan sarjana-sarjana dari berbagai disiplin ilmu, diaharapkan sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah regulasi dana pensiun syariah sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana pensiun baik di dunia maupun diakhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi “*Prosedur Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta :PT.Grafindo Persada, 2007)
- A. Setiadi, *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995)
- Cholid, Narbuko & H.Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Diponegoro)
- Edwin Nasutin, Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Fatwa Majles Ulama Indonesia DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002
- Fidaus, Muhammad, dkk, *Investasi halal di Reksa dana syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005)
- Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Husein, Umar, “*Metode Riset Bisnis*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- http://www.bapepam.go.id/dana_pensiun/regulasi_dp/regulasi_terkait_dp/PSAK%2018%20Akuntansi%20Dana%20Pensiun
- http://perpus.menpan.go.id/perundangan/PP_No_77_th_2000.pdf
- <http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%2071%202008%20PengembalianNilaiTunaiIuranPensiun.pdf>
- <http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%2071%202008%20>
- <http://kseicios.blogspot.com/2011/01/blog-post.html>
- Iman, Sjahputra Tunggal, *Tanya Jawab Aspek Hukum Dana Pensiun di Indonesia*, (Jakarta : Harvarindo, 1999)
- KMK No. 343.017/1998

- K .Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- Manaf, Setiawan, Idris dan Witoyo, Menggagas Tata Kelola yang Baik Bagi Dana Pensiun Islam, dalam konsultasi muamalat.wordpress.com, 2007)
- Muhammad, *Sistem dan prosedur operasional bank syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002)
- Maulana, Farizil Qudsi.2010. <http://ib.eramuslim.com/2010/05/14/dana-pensiun-syariah-kurang-perhatian/> diposting pada tanggal 14 Mei 2011
- Rivai,Veithzal dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Siamat, Dahlan *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)
- Somitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Thoha, Miftah, *Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2010) Cet. Ke.4, h. 46-53
- Tunggal, Amin Widjaja *Dasar – Dasar Akuntansi Dana Pensiun*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996), Cet. Ke-1
- UU No. 11 Tahun 1992
- Wahbah Zuhaili, “*Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*”
- Widyaningsih,dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: M2S Bandung, 2000)
- Zulaini, Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Zulkifli, Sunarto, Panduan praktis transaksi perbankan syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)